

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|---------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Indopos |

Sudah Sewajarnya Diterapkan

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Zita Anjani, mengatakan karantina wilayah atau lockdown di Jakarta memang sudah sewajarnya diterapkan. Hal ini mengingat separuh kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia berada di Jakarta.

Meski demikian, ada beberapa hal yang lebih penting untuk diperhatikan bersama dan lakukan di awal sebelum opsi karantina dilakukan. Salah satunya adalah menyiapkan memastikan kebutuhan para tenaga medis baik dokter maupun perawat tercukupi.

"Pemerintah menjamin ketersediaan rumah sakit, laboratorium, dan ketersediaan alat pelindung diri (APD) lengkap yang sesuai standar bagi para tenaga medis," ucap Zita, di Jakarta, Senin (30/3/2020).

"Bagaimana pasukan mau perang kalau tidak dibekali senjata yang bagus, bisa tewas pasukan sebelum mulai perang," lanjut dia. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta agar Pemprov melakukan ribuan pemeriksaan cepat (rapid test) setiap harinya.

Menurutnya yang paling penting harus dilakukan ribuan test hariannya, seperti di Korsel, Singapura, dan Tiongkok. Itu semua bisa kita lakukan dengan tes yang berkualitas atau swab test dan berlakukan itu di mana pun. Yang terakhir, Pemprov DKI juga diharapkan menjamin ketersediaan stok pangan selama karantina dan pasca karantina. "Itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Jangan sampai kita membatasi ruang gerak tapi tidak dibekali dengan sandang pangan, itu sama saja dibunuh perlahan warganya. Bahaya," cetus Zita.

Pemerintah pusat mengaku sudah menerima permintaan dari Gubernur



DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberlakukan karantina wilayah di Ibu Kota demi mencegah penyebaran Covid-19. Sementara itu, jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta sebanyak 701 orang per Minggu (29/3/2020) pukul 18.00 WIB.

Data terbaru mengenai kasus Covid-19 itu bisa dilihat melalui situs web corona.jakarta.go.id. Dari 701 pasien yang terinfeksi virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2), sebanyak 48 orang di antaranya dinyatakan sembuh dan 67 pasien lainnya meninggal dunia. Untuk pasien Covid-19, alamat 419 orang sudah diketahui, sementara tempat tinggal 282 pasien lainnya masih belum diketahui.

PKS Apresiasi

Fraksi PKS DPRD DKI menyatakan isu lockdown atau karantina wilayah di ibu kota Jakarta menjadi sesuatu yang harus dihadapi dan dipersiapkan. "Salah satu yang dipersiapkan Pemprov DKI adalah memastikan pasokan logistik di pasar-pasar daerah aman," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin, Senin (30/3/2020).

Dirinya berharap jangan sampai

karantina wilayah justru malah menyengsarakan warga, karena ketiadaan sejumlah bahan pokok di pasaran. "Sudah harus dipastikan Perumda Pasar Jaya dan stake holder pangan lainnya aman dalam 1-2 bulan ke depan di Jakarta," jelas Arifin.

Arifin menyebutkan adanya fasilitas pengiriman, setidaknya sampai di kawasan pemukiman-pemukiman. "Jadi barangnya didekatkan ke warga, jangan sampai warga harus bepergian jauh keluar untuk mendapatkan bahan pokok," ucap Arifin yang juga menjabat Ketua MPW PKS DKI Jakarta tersebut.

Arifin juga menekankan perlu kerjasama juga dengan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada antrian dan panic buying sehingga semua warga bisa mendapatkan secara proporsional. Jajaran di bawah seperti Camat, Lurah, RW dan RT perlu disiagakan juga terutama untuk mendorong saling bantu antar warga. "Khusus untuk rumah warga yang jadi PDP, ODP dan positif terinfeksi, logistiknya perlu diantarkan ke rumah," cetusnya.

Politisi PKS ini juga mengapresiasi aksi Pemprov DKI jika memang ha-

rus mengkarantina wilayah, karena itu salah satu cara menekan lajunya penyebaran Covid-19. "Kami mengapresiasi, karena sejalan dengan permintaan Presiden PKS untuk me-lockdown parsial beberapa wilayah yang terkena wabah virus korona yang cukup parah," pungkasnya.

Skema Biaya

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, membuat skema perhitungan biaya kebutuhan warga jika Jakarta dikarantina selama 14 hari untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19). Perhitungan Mujiyono, dibutuhkan dana Rp8,4 triliun untuk memenuhi kebutuhan pokok warga Jakarta.

Perhitungan pertama, bantuan diberikan hanya kepada penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan sejumlah 3,48 PBI di Jakarta. Jika perhitungan itu yang dipakai, maka pemerintah harus menyediakan dana Rp1,6 triliun.

"Pertama bantuan untuk warga penerima subsidi. Saya ambil dari data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS tahun 2016, saat itu tercatat paling banyak jumlahnya mencapai 3,48 juta. Jika dikalikan Rp33.000 per hari untuk makan sesuai angka kebutuhan gizi, maka total yang dibutuhkan Rp1,6 triliun," kata Mujiyono

Namun, jika pemerintah juga menanggung kebutuhan sabun, susu/MPASI Balita, kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, kebutuhan air minum dan operasional ojek online untuk mengantarkan paket makanan ke warga terdampak itu, perhitungannya menjadi berbeda. "Sehingga, total hitungan pada skema pertama ini dibutuhkan Rp4,4 triliun untuk biaya lockdown," kata Mujiyono. (dni)